

BAB I

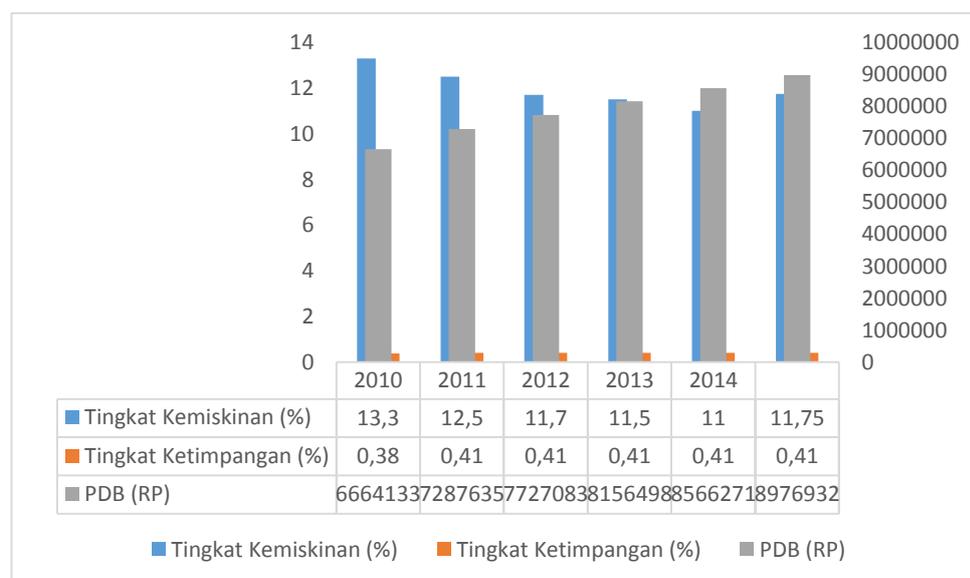
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Todaro, pembangunan berkaitan dengan berbagai macam aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi. Pembangunan mampu merubah tatanan struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan perubahan kelembagaan pemerintah baik di daerah ataupun tingkat nasional. Pembangunan mampu dioptimalkan dengan syarat setiap *stakeholder* mampu berperan dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan distribusi ketersediaan bahan pokok masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat baik dibidang ekonomi, bidang sosial dalam kehidupannya. Menurut BPS, pembangunan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perekonomian. (Frisdiantara & Mukhlis, 2016), (Arwati & Hadiati, 2016).

Pembangunan dalam sebuah negara dapat diukur dengan PDB (*Product Domestic Bruto*). PDB adalah nilai akhir dari produk (barang dan jasa) yang mampu diproduksi di sebuah negara dalam jangka waktu tertentu, termasuk produk yang diproduksi oleh warga asing di negara tersebut. Menurut Todaro, pembangunan yang hanya memandangi mengenai sisi ekonomi saja, akan gagal dalam memperbaiki taraf hidup (kesejahteraan) masyarakatnya (Muchlas & Alamsyah, 2015), (Sulistiawati, 2012).

Menurut Bappenas, tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kondisi dasar yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh, (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta pemberian tingkat upah yang layak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistiawati, 2012).



Sumber : (Bank Indonesia, 2015), (Data, 2016), (Indonesia Investments, 2015)

Gambar 1. 1.

Grafik Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan, dan Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2010-2015

Berdasarkan gambar 1.1. menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pendapatan nasional dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan PDB, dari tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut direspon baik dengan tingkat kemiskinan yang juga mengalami penurunan dari tahun 2010-2015. Akan tetapi, ketimpangan merespon negatif terhadap kenaikan PDB dari tahun ke tahun. Ketimpangan terus mengalami kenaikan dari tahun ke 2010-2013 dan mengalami stagnan pada angka 0,41 hingga tahun 2015. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia. Sumber daya dan demografis yang berbeda merupakan salah satu penyebab ketimpangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kemampuan setiap daerah dalam mendorong pertumbuhan juga berbeda (Fitriyah & Rachmawati, 2013).

Ketimpangan pembangunan diduga sebagai faktor utama masalah kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia. Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin mendapatkan banyak kesulitan akses publik yang terbatas, pendidikan yang kurang, ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih sedikit, biaya kesehatan yang tinggi, investasi yang rendah, pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Oleh karena itu, penyelesaian kemiskinan menyangkut berbagai aspek untuk menyelesaikannya, dan tidak hanya tertuju pada aspek ekonomi saja dan juga harus berkelanjutan (Sekretariat MDG`s, 2012).

Dari masalah kemiskinan tersebut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berinisiatif untuk membuat program MDG`s (*Millenium Suistainable Goals*) yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan

berbagai aspek sosial maupun ekonomi di negara-negara berkembang. MDG`s memiliki 8 tujuan besar. Tujuh diantaranya dikhususkan untuk negara berkembang , yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB), menghentikan kerusakan lingkungan dan mendorong pembangunan berkesinambungan. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan tujuan MDG`s dengan RPJPN (2005-2025) (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPM (2005-2009) (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RKP/Rencana Kerja Pemerintah (Rencana Pembangunan Tahunan Nasional) dan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) (Sekretariat MDG`s, 2012).

MDG`s merupakan program yang dicanangkan tahun 2000-2015. Dalam kesepakatan MDG`s bahwa program pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, maka setelah program MDG`s berakhir di deklarasikan program SDG`s (*Sustainable Development Goals*). Meskipun MDG`s dan SDG`s saling berhubungan dan berkesinambungan, namun dalam pelaksanaanya SDG`s jauh lebih lama yaitu dari adanya kesepakatan pada september 2015 sampai tahun 2030. SDG`s didasarkan pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Prinsip yang diterapkan dalam SDG`s adalah *universal*, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa semua individu tidak ada yang tersingkirkan dalam

agenda pembangunan. SDG`s terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka membangun dari upaya MDG`s berakhir tahun 2015 (SDGs Indonesia).

Tabel 1. 1.

Perbedaan MDG`s dan SDG`s

MDGs 2000-2015	SDGs 2015-2030
<p>50 Persen Yang menjadi target dan sasaran MDG`s adalah setengah dari kemiskinan. Sedangkan banyak negara yang telah mencapai target tersebut.</p>	<p>100 persen Yang menjadi target sasaran SDGs dalam kemiskinan sepenuhnya dan secara tuntas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri kemiskinan • 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran • Memerlukan fokus untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
<p>Dari Negara Maju ke Negara Berkembang Dalam prosesnya yang memiliki tugas untuk mengentaskan kemiskinan adalah negara berkembang yang kemudian didukung oleh negara maju</p>	<p>Berlaku Universal SDGs memiliki pandangan bahwa setiap negara ikut memiliki tugas dalam mencapai tujuan yang terkandung didalamnya. Dan setiap negara wajib mengatasinya, dan harus bekerjasama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p>
<p>Bersifat dari Atas (Top Down) Dokumen MDGs langsung dirumuskan oleh elit PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan OECD (<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>)</p>	<p>Bersifat dari Bawah (Bottom Up) dan Partisipatif SDG`s dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga</p>
<p>Solusi Parsial atau Tambal Sulam 8 tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala kemiskinan, dan belum memperdulikan masalah ekologi dan lingkungan hidup. Dalam sektor ekonomi misalnya ketimpangan, pajak dan pembiayaan pembangunan juga belum mendapatkan perhatian.</p>	<p>Solusi yang Menyeluruh 17 tujuan SDGs merupakan upaya untuk merubah sistem dan struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender • Tata pemerntahan • Perubahan model konsumsi dan produkdi • Perubahan sistem perpajakan • Mengakui masalah ketimpangan • Mengakui masalah perkotaan

Sumber : (Hoelman, Parhusip, Eko, Bahgijo, & Santono, 2016)

Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan mengadopsi SDG`s dalam Nawacita. Dalam Nawacita terdapat 9 prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla yang menjadi visi dan misi dalam memimpin Indonesia. Tabel berikut berisi mengenai SDG`s yang telah diterjemahkan dan dintegrasikan dengan Nawacita masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (UNDP).

Tabel 1. 2.

Konvergensi antara Nawacita, dan SDG`s

Nawacita	SDG`s
<p>N1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara Maritim</p>	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata- pranata yang efektif, akuntable, dan inklusif di semua tingkatan. G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan mervitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
<p>N2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan</p>	<p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata- pranata yang efektif, akuntable, dan inklusif di semua tingkat</p>

Lanjutan Tabel 1.2.

Nawacita	SDG`S
N3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p> <p>G7 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjutan, dan modern bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> <p>G11 Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.</p>

Lanjutan Tabel 1.2.

Nawacita	SDG`S
N4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
N5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.	G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya. G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak. G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.

Lanjutan Tabel 1.2.

Nawacita	SDG`S
<p>N6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p>	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya. G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak. G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua. G7 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjutan, dan modern bagi semua. G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua. G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjutan, serta mendorong inovasi. G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p>

Lanjutan Tabel 1.2.

Nawacita	SDG`S
N7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi.</p> <p>G12 Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p>

Lanjutan Tabel 1.2.

Nawacita	SDG`S
<p>N8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.</p>	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G11 Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.</p>
<p>N9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.</p>	<p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak. G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntable, dan inklusif di semua tingkatan. G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan mervitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>

Sumber : (UNDP, 2015)

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan, kondisi geografis tersebut dapat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan. Daerah kepulauan yang luas menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan koordinasi pemerintahan yang terdapat di daerah. Untuk itu diperlukan adanya penataan sistem pemerintah yang dapat berjalan secara efisien serta mandiri yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut didukung dengan perbedaan sumber daya antar daerah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu memudahkan pengelolaan sumber daya yang dapat menjadi sumber pendapatan setiap daerah sekaligus bisa menjadi pendapatan nasional. Sehingga pemerintah menganut sistem desentralisasi (Yapan`s, 2014).

Sistem desentralisasi yang telah dilaksanakan di Indonesia, membuat sebagian besar nasib masyarakat bergantung pada kinerja pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi dalam ilmu administrasi adalah sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari sebuah tingkat pemerintah kepada tingkat yang lebih rendah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian SDG`s. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan warga, sehingga mereka lebih mengenal masalah yang dihadapi dan mampu lebih berinovasi dibandingkan dengan pemerintah pusat. Inovasi yang dimiliki menjadikan pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam penyediaan layanan publik dan berbagai kebijakan program pemerintah (Setiawan & Hakim, 2013)., (Hoelman et.al, 2015).

Tabel 1 .3.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota D I Yogyakarta 2014-2015

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	%
Kulon Progo	265.575	84,67	20,64
Bantul	301.986	153,49	15,89
Gunung Kidul	243.847	148,39	20,83
Sleman	306.961	110,44	9,5
Yogyakarta	366.520	36,6	14,55

Sumber : (BPS, 2015)

Kebebasan otonomi daerah, memberikan wewenang pemerintah dalam penerapan SDG`s di daerahnya. Sesuai dengan tujuan SDG`s yakni untuk mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan, Kabupaten Kulon Progo yang dikenal sebagai Kabupaten termiskin kedua di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Gunung Kidul berinovasi untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Pemerintah Kulon Progo mengadapatasi tujuan SDG`s (1) mengentaskan kemiskinan, (3) kesehatan dan kesejahteraan untuk semua, (10) mengurangi ketimpangan. SDG`s tersebut diterapkan dalam program-program pengentasan kemiskinan antara lain, *One Village One Sister Company*(Satu desa satu dibina oleh perusahaan), KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun), Bela dan Beli Kulon Progo, *Universal Coverage*. Semua program tersebut ditujukan untuk mengurangi ketimpangan di daerah Kulon Progo (Ni`mah, et al., 2016).

Tabel 1. 4.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Kabupaten Kulon Progo tahun 2002-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persen
2002	105.404	93,00	25,10
2003	119.538	91,40	24,35
2004	129.057	94,60	25,11
2005	144.076	104,30	26,80
2006	162.158	106,10	28,39
2007	173.738	103,80	28,61
2008	197.507	97,92	26,85
2009	205.585	89,91	24,65
2010	225.059	90,06	23,15
2011	240.301	92,76	23,62
2012	250.854	93,21	23,31
2013	259.945	86,50	21,39
2014	265.575	84,67	20,64

Sumber: (Susenas 2002-2013)

Dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon progo, maka garis kemiskinan di daerah tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2012, garis kemiskinan menurun sebesar 0,31 dari tahun 2011. Tahun 2013, kemiskinan bertambah menurun sebesar 1,92 dibandingkan dengan tahun 2012. Dan pada tahun 2014 garis kemiskinan mengecil sebesar 0,75 dibandingkan tahun 2013.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Implementasi SDG's Di Kabupaten Kulon Progo.**

B. Batasan Masalah

Mengingat tujuan dari SDG`s yang multidimensional, pada penelitian ini dibatasi pada analisis program-program yang merupakan implementasi SDG`s pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binaan), Bela dan Beli Kulon Progo dalam studi ini adalah batik, program *One Village One Sister Company* (Satu desa dibina satu perusahaan), *Universal Coverage* (Jaminan Kesehatan Semesta). Dalam penelitian ini program pengentasan kemiskinan di katakan berhasil apabila terdapat kenaikan pendapat penerima program.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi dalam bentuk pertanyaan dasar yang perlu memperoleh jawaban dari penelitian tersebut, yaitu antara lain:

1. Apa yang menjadi faktor pendukung implementasi program SDG`s di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi program SDG`s di Kabupaten Kulon progo?
3. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam implementasi SDG`s di Kabupaten Kulon Progo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penerapan SDG`s di Kabupaten Kulon

Progo adalah :

1. Mengetahui faktor pendorong implementasi SDG`s di Kabupaten Kulon Progo
2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi SDG`s di Kabupaten Kuhn Progo
3. Mengetahui strategi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program implementasi SDG`s untuk mengurangi kemiskinan di daerahnya

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. *Bagi Peneliti*, Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya yang terkait dengan pembangunan dan penerapan SDG`s untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat daerah..
2. *Bagi Pemerintah*, Mengetahui pelaksanaan SDG`s di tingkat bawah, serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu untuk pemerintah daerah lain bisa menjadi salah satu masukan untuk menerapkan program pengentasan kemiskinan.

3. *Bagi Masyarakat*, Mampu membantu masyarakat untuk lebih mengetahui program pengentasan kemiskinan, sehingga diharapkan mampu berperan serta dalam pelaksanaan SDG`s untuk mencapai kesejahteraan.
4. *Bagi Peneliti Lain*. Dapat memberikan gambaran atau pengetahuan bagaimana proses pengembangan masyarakat terkait masalah penerapan SDG`s sehingga nantinya mampu dikembangkan menjadi penelitian yang lebih luas